

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi terjadi sangat pesat pada saat sekarang ini. Perkembangan ini hampir meliputi semua aspek yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi, dimana para pengambil keputusan dituntut untuk bisa menghasilkan keputusan yang cepat, tepat dan efektif. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) mempunyai peranan penting dalam urusan pengambilan keputusan, karena SPK dapat menghasilkan keputusan secara cepat, tepat dan efektif dengan menggunakan berbagai metode untuk memecahkan permasalahan yang ada.

SPK merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan oleh parapengambil keputusan manajerial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam situasi keputusan semi terstruktur (Angga et al., 2010). *Analytical Hierarchy Process (AHP)* merupakan salah satu model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multi faktor atau mutu kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki (Fakhriza & Ispandi, 2018). Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian disusun secara hirarki sehingga permasalahan akan terlihat lebih terstruktur dan sistematis.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UUPK) yang termasuk pegawai negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan yang termasuk PNS *adalah PNS Pusat dan PNS Daerah*. Disamping itu, pejabat yang berwenang juga dapat mengangkat *pegawai tidak tetap*(Wirawan., 2018)

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang pegawai berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Maka dari itu diperlukan pegawai yang berkualitas dan mempunyai kompetensi tinggi, karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kerja. Penilaian kinerja harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai. Dengan melakukan proses penilaian kinerja maka prestasi yang dicapai setiap pegawai akan dinilai dengan nilai baik sekali, baik, cukup atau kurang bisa diketahui. Penilaian prestasi penting bagi setiap pegawai dan berguna untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya(Suherdi et al., 2018)

Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar

dan Pertambangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan. Dinas KOPERINDAG dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Dinas yang bergerak di bidang Ekonomi, yang terdiri dari 5 bidang yaitu bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, pasar dan pertambangan, dan satu sekretariat dan Kepala Dinas. Untuk masing – masing bidang dan sekretariat dibantu 3 Kasi/ Kasubag` dan untuk jelasnya dapat di lihat pada Struktur Organisasi Dinas KOPERINDAG. Secara umum Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAG) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan Pertambangan (KOPERINDAG) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan.
2. Pemberian dan pelaksanaan pelayanan dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan.
3. Pengelolaan Urusan Ketata Usahaan Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan.

Dengan adanya permasalahan diatas, saya mengajukan sebuah sistem yang dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan keputusan kenaikan pangkat

secara cepat, tepat dan efektif dengan menggunakan metode AHP. Maka saya mengajukan judul skripsi :

“Perancangan Sistem Penunjang Keputusan Dalam Analisa Kenaikan Pangkat Pada Kantor Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Pesisir Selatan Dengan Penerapan Metode AHP Berbasis Website”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat membantu Pegawai dalam proses pengajuan kenaikan pangkat?
2. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat membantu KOPERINDAG Kabupaten Pesisir Selatan untuk menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat?
3. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kenaikan pangkat?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat membantu Pegawai dalam proses pengajuan kenaikan pangkat.
2. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat membantu KOPERINDAG Pesisir Selatan untuk menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat.
3. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kenaikan pangkat.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari topik permasalahan maka perlu dibatasi permasalahan yang dibahas. Adapun batasan masalahnya adalah :

1. Perancangan sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai *Database Management System (DBMS)*.
2. Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan adalah *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

3. Data yang diolah berupa data pegawai, penilaian kriteria, dan penilaian alternatif.
4. *Output* dari sistem berupa keputusan hasil penilaian kenaikan pangkat Pegawai.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pegawai dalam proses pengajuan kenaikan pangkat dengan waktu yang lebih singkat.
2. Menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat yang dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kenaikan pangkat dan membantu KOPERINDAG Pesisir Selatan untuk menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan bangku perkuliahan.
 - b. Memperoleh pengalaman dalam penelitian dengan judul terkait.
 - c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait sistem yang dirancang.
2. Bagi Pegawai KOPERINDAG
 - a. Mempermudah dalam input, proses, dan output informasi.
 - b. Proses yang ada dalam kegiatan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.

- c. Memberikan informasi secara *uptodate* kepada Pegawai yang mengurus kenaikan pangkat.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

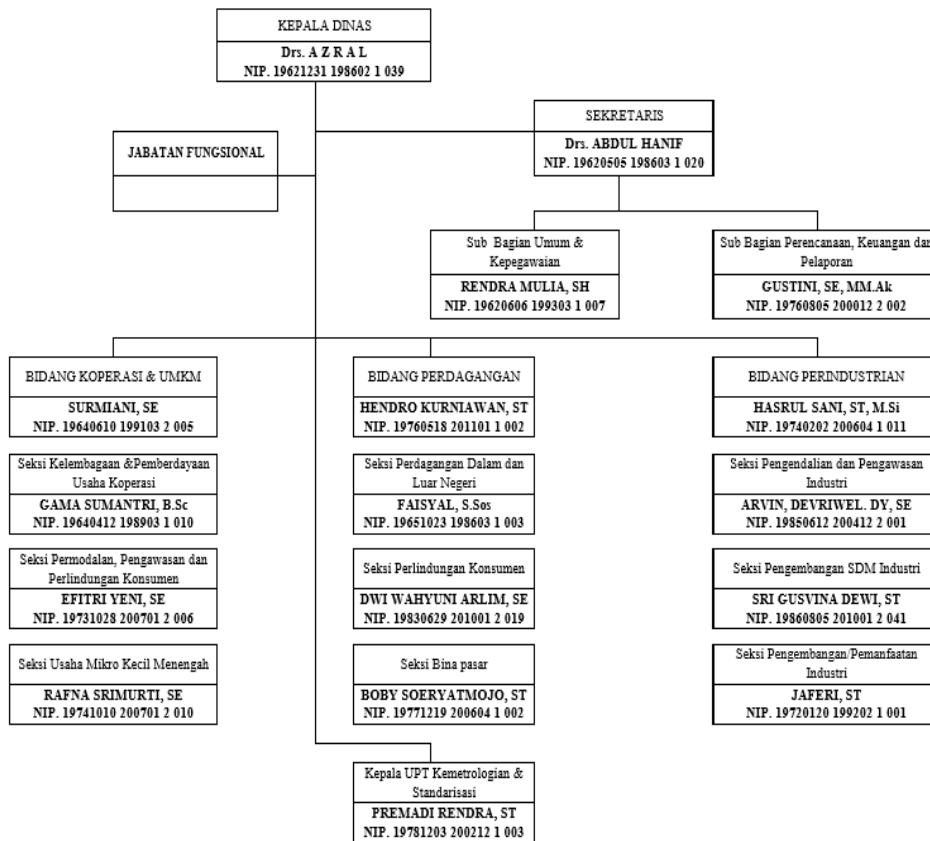
1.7.1 Sejarah Perusahaan

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami beberapa kali perubahan SOTK. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (KOPERINDAG) Kabupaten Pesisir Selatan awalnya berada dalam satu atap yang sama yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Kemudian pada tahun DISPERINDAGKOP dipecah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berdasarkan Perbub Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dan Dinas Koperasi & UMKM sesuai Perbub Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sesuai dengan Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) bergabung kembali dengan Dinas Koperasi dan UMKM menjadi Dinas KOPERINDAG. Pada bulan Oktober 2013, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perubahan SOTK, dengan bertambahnya jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar yang awalnya 1 (satu) menjadi 3 (tiga), dan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Metrologi. Melalui

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pembentukan UPT Pasar dan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pembentukan UPT Metrologi diharapkan dapat meningkatkan fungsi pelayanan Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan di bidang Pasar dan Perlindungan Konsumen, dan semakin mengukuhkan keberadaannya sebagai salah satu dinas penyumbang PAD bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.7.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperindag Kabupaten Pesisir Selatan

1.7.3 Tugas dan Wewenang

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat memanfaatkan Sistem Informasi Kredit Program

(SIKP) dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah setempat."SIKP ini digunakan untuk menyajikan data UMKM ke perbankan, mulai dari jenis usaha, peluang pengembangan hingga keuntungan dan lainnya.

Dari data itu, selanjutnya pihak perbankan akan menyeleksi UMKM mana saja yang layak menerima bantuan permodalan.Setidaknya pada 2018 pihaknya menyajikan lebih kurang 150 data UMKM dan dari data itu sebanyak 27 dinyatakan layak menerima bantuan permodalan.

Bantuan permodalan, lanjutnya, bervariasi mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah tergantung hasil survei perbankan mengenai kesiapan UMKM itu sendiri. "Jadi data yang kami sajikan itu merupakan rekomendasi, layak atau tidaknya ditentukan oleh perbankan," katanya lagi.Kedepan pihaknya akan menyajikan lebih banyak data UMKM, terutama yang potensial, sehingga kegiatan itu mampu menumbuhkembangkan UMKM.

"Hampir rata-rata kendala-kendala yang dihadapi UMKM adalah permodalan dan kami menilai SIKP ini merupakan salah satu upaya dalam mencarikan jalan keluar terhadap persoalan itu," jelasnya.